

Efforts to Prevent Transnational Crime of Narcotics Smuggling in the Riau Islands Province (Case Study at the Riau Islands National Narcotics Agency)

Alya Septi Dwirianti Putri^{1*}, Muhammad Zulherawan²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 25 March 2026

Revised 31 March 2026

Accepted 10 April 2026

Available online 16 April 2026

Keywords: border region, narcotics, prevention, Riau Islands, transnational crime.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Narcotics smuggling as a form of transnational crime poses a serious threat in border regions, particularly in the Riau Islands Province, which has a strategic position and high geographical vulnerability. This study aims to analyze the prevention efforts carried out by the National Narcotics Agency of the Riau Islands Province. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed through an interactive model. The findings indicate that prevention is implemented through primary, secondary, and tertiary strategies supported by inter-agency collaboration and community participation. This study contributes to strengthening community-based prevention approaches and cross-border cooperation. In conclusion, the effectiveness of prevention is influenced by geographical, social, and institutional factors, highlighting the need for strengthening resources and further longitudinal-based research.

PENDAHULUAN

Transnational Crime, khususnya penyelundupan narkoba, menjadi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Peningkatan mobilitas manusia, perkembangan teknologi, dan keterbukaan hubungan antarnegara telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi jaringan kejahatan lintas negara. Di kawasan Asia Tenggara, peredaran narkoba menjadi ancaman serius, terutama karena wilayah ini memiliki jalur perdagangan strategis dan kedekatan geografis dengan kawasan produksi narkoba dunia, seperti "Golden Triangle." Menurut Luong (2022) dan Nasution & Argenti (2025), perdagangan narkoba di kawasan ini terus berkembang, melibatkan jaringan kriminal terorganisasi yang memanfaatkan perbedaan sistem hukum, lemahnya pengawasan perbatasan, serta tingginya permintaan pasar.

Di Indonesia, persoalan penyelundupan narkoba menjadi lebih kompleks akibat karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas serta banyaknya pelabuhan resmi maupun tidak resmi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi jaringan kejahatan terorganisasi untuk memanfaatkan jalur laut sebagai rute utama penyelundupan narkoba. Pengawasan yang tidak merata di wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Penelitian sebelumnya oleh Wattimena (2025) dan Prayuda et al. (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia menggunakan jalur maritim dengan berbagai modus operandi, seperti penggunaan kapal kecil, keterlibatan nelayan sebagai kurir, serta pemanfaatan pelabuhan tidak resmi untuk menghindari pengawasan.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap penyelundupan narkoba lintas negara. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura serta dominasi wilayah perairan yang mencapai sekitar 96 persen menjadikan daerah ini sebagai jalur strategis bagi masuknya narkoba ke Indonesia. Selain itu, sejumlah pelabuhan di Malaysia seperti Kukup dan Stulang Laut kerap dimanfaatkan sebagai titik

transit sebelum narkoba diselundupkan ke wilayah Kepulauan Riau dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia (Prayuda et al., 2024).

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Narkoba di BNNP Kepulauan Riau 2023-2025

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS NARKOTIKA	TERSANGKA	KEWARGANEGARAAN	
				WNI	WNA
1.	2023	30	43	40	1
2.	2024	17	32	41	2
3.	2025	35	53	46	7

Sumber: Data Internal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2023-2025

Data empiris menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau masih tergolong tinggi. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mencatat pada tahun 2024 terdapat 95 kasus narkoba dengan 152 tersangka yang berhasil diamankan serta penyitaan berbagai jenis barang bukti (Polda Kepri, 2024). Selain itu, BNNP Kepulauan Riau juga mengungkap 35 kasus narkoba dengan 53 tersangka pada tahun 2025, termasuk keterlibatan beberapa warga negara asing dalam jaringan internasional (BNNP Kepri, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau tidak hanya bersifat lokal, tetapi telah terhubung dengan jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Walaupun berbagai upaya penegakan hukum dan pencegahan telah dilakukan, praktik penyelundupan narkoba lintas negara masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan wilayah perbatasan yang luas dan kompleks. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perdagangan narkoba dalam perspektif regional atau pada tingkat kebijakan makro di Asia Tenggara. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis strategi pencegahan pada tingkat lembaga penegak hukum di daerah perbatasan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan kejahatan transnasional berupa penyelundupan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dengan menitikberatkan pada peran dan strategi BNNP Kepulauan Riau. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kejahatan transnasional dan kebijakan pencegahannya, khususnya dalam konteks keamanan maritim dan wilayah perbatasan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyelundupan narkoba lintas negara, khususnya di wilayah Kepulauan Riau dan kawasan perbatasan Indonesia lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal yang berfokus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau di Kota Batam. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BNNP Kepulauan Riau, Kota Batam, yang berperan sebagai pusat koordinasi pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan transnasional. Penelitian mencakup analisis upaya pencegahan pada periode 2023–2025, sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan secara intensif pada tahun 2025.

Populasi penelitian terdiri dari pejabat dan staf BNNP Kepulauan Riau serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan penyelundupan narkoba. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah enam narasumber, terdiri atas satu key informan dan lima informan. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan yang relevan, seperti Kepala Bagian Umum, Kepala Seksi Intelijen, Penyuluh Narkoba, Konselor Adiksi, staf Humas, dan tokoh masyarakat. Jumlah informan bersifat fleksibel menyesuaikan kebutuhan hingga mencapai saturasi data.

Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali strategi pencegahan, koordinasi, dan hambatan; observasi partisipatif maupun non-partisipatif terhadap kegiatan patroli, pelatihan, serta operasi lapangan BNNP; dan studi dokumentasi berupa laporan resmi, foto, serta video kasus. Data sekunder diperoleh dari dokumen BNNP Kepulauan Riau, laporan kepolisian, media massa, literatur ilmiah, dan publikasi UNODC. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, dan verifikasi (Yin, 2018).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, coding terbuka, dan pemfokusan pada transkrip wawancara, observasi, serta dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, matriks, dan diagram tema seperti kerja sama lintas batas. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui triangulasi dan member checking. Proses analisis berlangsung secara simultan selama penelitian tanpa menggunakan perangkat lunak khusus, dengan penekanan pada interpretasi tematik serta pola fenomena pencegahan penyelundupan narkoba (Miles et al., 2014).

HASIL

1. Pencegahan Primer

Dalam teori strategi pencegahan kejahatan, pencegahan primer diarahkan pada kelompok yang belum terlibat agar tidak mencoba atau menggunakan narkoba. BNNP Kepri menekankan edukasi dasar tentang bahaya narkoba, pembekalan pengetahuan kepada pelajar, keluarga, masyarakat umum, dan kelompok pesisir agar memiliki ketahanan diri yang kuat. Program yang mendukung pencegahan primer antara lain Ananda Bersinar, integrasi kurikulum anti-narkoba (IKAN), sekolah bersinar, penyuluhan media sosial, serta pembentukan kesadaran bahwa narkoba bukan sekadar isu kesehatan, tetapi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Strategi ini juga dilakukan dengan pendekatan kultural dan emosional, misalnya menysar ibu-ibu, tokoh agama, dan komunitas agar pesan pencegahan lebih mudah diterima dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan pada kelompok atau wilayah yang berisiko tinggi, seperti masyarakat pesisir, nelayan, pelaut, dan pemuda di daerah terpencil. BNNP Kepri memetakan wilayah rawan dan menjadikan masyarakat setempat sebagai relawan, satgas, atau informan agar bisa mendeteksi dini aktivitas mencurigakan di pelabuhan kecil, pesisir, dan pulau-pulau yang sulit dijangkau. Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak dilakukan dengan kampanye umum saja, melainkan melalui partisipasi langsung di kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pengajian, karang taruna, dan forum komunitas. Strategi ini penting karena BNNP Kepri menilai pencegahan di wilayah kepulauan tidak efektif bila hanya mengandalkan penyuluhan formal tanpa dukungan informasi masyarakat setempat.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier diarahkan kepada individu yang sudah terlibat agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak kembali masuk ke jaringan kejahatan narkoba. Dari transkrip, BNNP Kepri menerapkan pendekatan rehabilitasi berkelanjutan, pascarehab, pendampingan klien, kunjungan rumah, serta dukungan keluarga untuk mencegah relapse atau kambuh kembali. Selain itu, terdapat kerja sama dengan komunitas aftercare sebagai wadah mantan penyalahguna yang saling mendukung agar tetap pulih, produktif, dan mampu berfungsi sosial di masyarakat. Untuk kelompok rentan yang pernah terlibat aktivitas ilegal, BNNP juga menjalankan pemberdayaan alternatif dan pelatihan life skill agar mereka memperoleh mata pencaharian baru dan tidak kembali tergoda oleh iming-iming keuntungan cepat dari sindikat narkoba.

4. Kolaborasi Antarinstansi

Hasil wawancara menegaskan bahwa pencegahan penyelundupan narkoba tidak bisa dilakukan BNNP Kepri sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi dengan Bea Cukai, Polri, TNI AL, Bakamla, KSOP, imigrasi, serta pemerintah daerah. Kerja sama ini penting karena pengawasan laut membutuhkan kapal, teknologi, dan kewenangan lintas lembaga yang tidak selalu dimiliki BNNP secara mandiri. Dalam banyak kasus, penindakan dilakukan melalui pola interdiksi terpadu, patroli gabungan, dan pertukaran informasi intelijen antarinstansi. Ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan di Kepri tidak berdiri sendiri, melainkan mengandalkan sinergi kelembagaan sebagai bagian dari pengendalian jalur distribusi narkoba lintas negara.

5. Hambatan Utama

Hambatan utama yang muncul dari transkrip adalah luasnya wilayah kepulauan, keterbatasan personel, minimnya sarana pengawasan laut, serta anggaran yang belum menjangkau seluruh daerah seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Selain itu, sindikat narkoba dinilai sangat adaptif, berpindah rute dari pelabuhan resmi ke pelabuhan tikus, menggunakan teknologi komunikasi yang sulit dipantau, dan memanfaatkan jaringan di dalam lapas maupun mantan narapidana. Hambatan lain muncul dari tidak kooperatifnya tersangka, potensi kebocoran informasi, dan kemampuan jaringan untuk segera mencari pengganti kurir setelah penangkapan. Situasi ini menunjukkan bahwa karakter kejahatan narkoba di Kepri bersifat dinamis, terorganisasi, dan terus menyesuaikan diri dengan pola pengawasan aparat.

PEMBAHASAN

Karakteristik Ancaman Penyelundupan Narkoba di Kepulauan Riau

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penyelundupan narkoba. Hal ini disebabkan oleh dominasi wilayah perairan, keberadaan pulau-pulau kecil yang tersebar, serta letaknya yang berdekatan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut menjadikan wilayah ini sebagai jalur strategis bagi jaringan sindikat transnasional dalam mendistribusikan narkoba melalui jalur laut. Aktivitas penyelundupan tidak hanya memanfaatkan pelabuhan resmi, tetapi juga pelabuhan tidak resmi yang sulit diawasi. Selain berperan sebagai pintu masuk, wilayah ini juga kerap difungsikan sebagai titik transit, bahkan dalam beberapa kasus menjadi lokasi produksi narkoba.

Pencegahan Primer dalam Strategi BNNP Kepulauan Riau

Upaya pencegahan primer yang dilakukan oleh BNNP Kepulauan Riau berfokus pada masyarakat luas dengan tujuan mencegah paparan narkoba sejak dini. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup sosialisasi, edukasi, program Sekolah Bersinar, Ananda Bersinar, serta

integrasi materi anti-narkoba ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, pendekatan juga dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan aktivitas berbasis komunitas, seperti pengajian, arisan, dan pertemuan warga. Strategi ini bertujuan agar pesan pencegahan dapat disampaikan secara efektif dan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.

Pencegahan Sekunder pada Kelompok Rentan

Pencegahan sekunder diarahkan pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap keterlibatan dalam penyelundupan narkoba, seperti nelayan, pemuda di wilayah pesisir, masyarakat pulau terpencil, serta kelompok ekonomi lemah. Dalam pelaksanaannya, BNNP Kepulauan Riau melakukan pemetaan wilayah rawan, melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pengolahan hasil laut. Pendekatan ini menjadi krusial mengingat sindikat narkoba kerap memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk merekrut mereka sebagai kurir maupun pelaku pendukung.

Pencegahan Tersier bagi Pelaku dan Mantan Pengguna

Pencegahan tersier ditujukan kepada individu yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan mencegah terjadinya pengulangan tindakan. Berdasarkan hasil wawancara, BNNP Kepulauan Riau melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan, pendampingan pascarehabilitasi, pengawasan terhadap residivis, serta menjalin koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga pada reintegrasi sosial melalui dukungan keluarga, pemantauan lingkungan sosial, dan pembentukan pola hidup sehat.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan, BNNP Kepulauan Riau menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga. Sinergi dilakukan dengan instansi seperti Bea Cukai, TNI AL, Bakamla, Polri, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan. Kolaborasi ini menjadi krusial mengingat luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau yang tidak memungkinkan pengawasan dilakukan secara mandiri. Selain itu, kerja sama juga mencakup pertukaran informasi intelijen, patroli terpadu, serta penguatan pengawasan di titik-titik rawan penyelundupan.

Hambatan dalam Implementasi Strategi

Dalam implementasinya, BNNP Kepulauan Riau menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pengawasan laut, serta luasnya cakupan wilayah perairan. Selain itu, distribusi instansi vertikal yang belum merata di seluruh wilayah kepulauan turut menjadi tantangan. Di sisi lain, sindikat narkoba terus menunjukkan kemampuan adaptasi dengan mengubah rute, memanfaatkan pelabuhan kecil, serta menggunakan teknologi komunikasi yang sulit terdeteksi. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika ancaman yang berkembang.

SIMPULAN

1. Penyelundupan narkoba di Kepulauan Riau merupakan kejahatan transnasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah kepulauan, banyaknya jalur laut, pelabuhan kecil, dan kedekatan dengan negara tetangga.
2. BNNP Kepulauan Riau menerapkan strategi pencegahan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
3. Pencegahan primer dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, program Ananda Bersinar, sekolah bersinar, dan integrasi kurikulum anti-narkoba untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini.

4. Pencegahan sekunder difokuskan pada kelompok rentan seperti nelayan, pemuda pesisir, dan masyarakat pulau terpencil melalui pemetaan wilayah rawan,elibatan masyarakat, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
5. Pencegahan tersier dilakukan melalui rehabilitasi, pendampingan pascarehabilitasi, dan pengawasan residivis, namun efektivitas seluruh strategi masih bergantung pada kolaborasi lintas instansi dan dukungan masyarakat.

SARAN

1. BNNP Kepulauan Riau perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi pencegahan narkoba secara berkelanjutan di sekolah, keluarga, dan komunitas masyarakat.
2. Pemerintah daerah serta instansi terkait perlu meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, terutama nelayan, pemuda pesisir, dan masyarakat pulau terpencil, agar tidak mudah direkrut sindikat.
3. Kolaborasi antara BNNP Kepri dengan Bea Cukai, TNI AL, Bakamla, Polri, dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan jalur laut dan pertukaran informasi intelijen.
4. Program rehabilitasi dan pendampingan pascarehabilitasi perlu dioptimalkan agar mantan pengguna dan residivis tidak kembali terlibat dalam penyelundupan narkoba.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Laporan pengungkapan kasus narkoba tahun 2025. BNNP Kepulauan Riau.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. (2024). Laporan penanganan kasus narkoba tahun 2024. Polda Kepulauan Riau.
- Luong, H. T. (2022). Transnational drug trafficking in Southeast Asia: Identifying national limitations to look for regional changes. *Estudios Criminológicos*, 64(1), 1–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R., & Argenti, G. (2025). The spread of narcotics in Southeast Asia: ASEAN's role in tackling drug trafficking. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12A), 360–367.
- Prayuda, R., Munir, F., Admiral, & Suyastri, C. (2024). The evolving threat of narcotics smuggling: A non-traditional security challenge in Southeast Asian border states. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 45–62.
- Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono. (2019). Narcotics smuggling routes in the Southeast Asia region: Case study in the Riau Province, Indonesia. *Security Dimensions*, 30, 116–133. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2796>
- Rinaldi, K., Tutrianto, R., bin Ahmad, M. F., & Zulherawan, M. (2023). Analysis of narcotics circulation in Riau Province: Inherited and studied in the view of criminology integrative theory. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 47–66.
- Wattimena, R. M. (2025). Law enforcement in criminal acts of narcotics smuggling in maritime areas. *Legal Brief*, 14(1), 112–123.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., & Setiawan, S. (2024). Manajemen Polda Riau dalam upaya pengungkapan kejahatan narkoba menggunakan teknik undercover buy. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 484–489.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the dangers of drugs and drug crime patterns to high school students as an effort to make teenagers clean from drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59–64.